



KOMISI D JAMIN HAK PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

Tak Masuk KMS, Warga Mengadu ke Dewan

YOGYA (KR) - Sekitar 100 warga Kota Yogya mengadu ke lembaga dewan lantaran tidak masuk sebagai penerima Kartu Menuju Sehat (KMS). Mereka juga mempertanyakan program tersebut karena mendapat informasi KMS tidak lagi digulirkan dan digantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kehadiran warga itu turut didampingi ketua kampung maupun RW setempat. "Informasinya kan tahun ini tidak ada lagi KMS. Semua mengacu pada DTKS. Tetapi kemarin ada pembagian KMS. Kami juga harus menengahi warga kami yang tidak mendapatkan KMS," terang Ketua RW 09 Wirogunan, Mergangsan, Yogi Prasetyo, di gedung DPRD Kota Yogya, Selasa (31/1).

Yogi tidak menampik, sebagian warga mengharapkan KMS untuk bisa mendapatkan kuota ke sekolah negeri. Apalagi lokasi sekolah negeri khususnya jenjang SMP tidak merata sehingga perebutan kursi tidak seimbang. Oleh karena itu dirinya mengharapkan advokasi dari anggota dewan sekaligus memperoleh

gambaran utuh terkait KMS. Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi D DPRD Kota Yogya Suryani, mengungkapkan pihaknya akan menjamin hak warga terkait pendidikan maupun kesehatan. Warga yang tidak masuk sebagai penerima KMS pun jangan khawatir karena sudah ada kebijakan dari pemerintah. "KMS jangan dijadikan tujuan untuk sekolah negeri. Kalau pun harus sekolah di swasta, kami bersama eksekutif sudah menyiapkan skema bantuan yang bisa diakses," ujarnya.

Skema tersebut antara lain bantuan tunggakan SPP yang tahun lalu dianggarkan Rp 1 miliar. Kemudian bantuan ijarah tertinggal dengan alokasi maksimal Rp 3 juta tiap siswa bagi jenjang SD serta maksimal

Rp 6 juta tiap siswa di jenjang SMA. Selain itu juga ada bantuan operasional sekolah daerah (bosda) swasta dengan besaran antara Rp 2,25 juta hingga Rp 4,5 juta per siswa per tahun sesuai jenjang sekolah. "Semua bantuan itu bisa diakses. Terlebih tunggakan SPP dan ijarah tertinggal, silakan diajukan supaya nanti bisa diverifikasi. Kalau bosda swasta langsung masuk ke rekening sekolah," paparnya.

Dengan demikian, penduduk Kota Yogya seharusnya tidak khawatir menyangkut akses pendidikan. Apalagi kesehatan yang cakupannya sudah mencapai 99,9 persen.

Komis D menaruh perhatian serius untuk dua bidang tersebut guna pembangunan sumber daya

manusia. Suryani juga tidak menampik sekolah negeri di Yogya sisi selatan jumlahnya sedikit. Namun pihaknya bersama dinas terkait sudah menambah jumlah kelas agar daya tampungnya semakin banyak. Langkah tersebut dinilai lebih efektif jika dibanding mendirikan sekolah baru. Selain itu, kuota KMS untuk kursi di SMP negeri sebetulnya juga tidak banyak, yakni 11 persen. Kuota itu pun sudah mempertimbangkan rasa keadilan bagi elemen masyarakat lain yang non KMS.

"Lebih baik mari kita ajari anak-anak kita untuk belajar agar bisa bersaing ke jalur prestasi atau jalur mutu. Kuotanya justru lebih besar di sana. Kalau pun belum mampu bersaing, kan tidak masalah di swasta. Toh skema bantuan juga besar," tandasnya.

Terkait data pemegang KMS maupun DTKS yang dinilai warga tidak tepat, Suryani mengajak untuk mela-



KR/Ardu Wahdan

Sejumlah warga mengadu ke DPRD Kota Yogya terkait persoalan KMS 2023.

porkan ke instansi terkait disertai bukti. Hal ini supaya intervensi dari pemerintah benar-benar tepat sasaran. Sementara Substansi Data dan Informasi Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogya Agus Budi, menjelaskan pihaknya tidak menghapus KMS. Akan tetapi pendataan KMS memang sudah tidak dilakukan karena semua

program bantuan sosial harus berdasarkan pada satu data yakni DTKS, sesuai arahan dari KPK. "Justru kami selalu mendorong ke wilayah agar warga kurang mampu yang belum masuk DTKS segera diusulkan melalui wilayahnya. Selanjutnya DTKS itu akan kami verifikasi dan hasilnya kami wujudkan dalam KMS," jelasnya.

Pada tahun ini, semua pe-

meegang KMS merupakan bagian dari DTKS. Berbeda dengan tahun lalu, masih ada 12 KK atau 812 jiwa pemegang KMS namun tidak masuk DTKS. Jumlah DTKS Kota Yogya yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial mencapai 55.019 KK atau 146.789 jiwa. Sedangkan hasil verifikasi, terdapat 17.451 KK atau 49.121 jiwa masuk KMS tahun 2023.

(Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005